

## ABSTRAK

*Lembaga Pemerintahan Non Kementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan. LKPP merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang berdiri sejak 2007. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga Pemerintah yang dibentuk untuk mengatur proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Proses pengadaan di lingkungan pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Lembaga tersebut diperlukan untuk perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa Demi mengoptimalkan kinerja dan aset tersebut diatas, sebagai pengembangan tugas dan fungsi lembaga, LKPP bermaksud menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung baru pada lokasi dimaksud. Memenuhi kebutuhan ruang yang dibutuhkan dan dapat mewadahi kegiatan LKPP dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi yang diembannya.*

**Kata Kunci:** *Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintahan*

## ABSTRACT

Government agencies are the Ministry of Non-state institutions in Indonesia, which was formed to carry out certain governmental tasks of the president. LPNK head under and directly responsible to the president through the minister or ministerial-level officials are coordinating. Audited Ministry is a Non Government Organization that was founded in 2007. Policy Institute for Procurement of Goods / Services (Audited) is a government agency established to regulate the process of procurement of goods / services that are financed by the state budget / budget. Within the government procurement process is expected to be implemented more effectively and efficiently and prioritize the application of the principles of fair competition, transparent, open and fair treatment for all parties. To optimize asset performance and above, as the duties and functions of development agencies, Audited intend to organize the construction of a new building at the location. Meet the needs of the space required and can accommodate Audited activities in implementing the duties and functions assigned

**Keywords:** *Ministry of Non-Government Institutions, Procurement of Goods / Services, Government*